



1.1.5 URUSAN WAJIB KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

A. KEBIJAKAN PROGRAM

Arah kebijakan program pada Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat tahun 2018 diarahkan pada pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Adapun Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Program ini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur untuk menunjang pelaksanaan tugas.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur. Program ini diarahkan kepada peningkatan kemampuan atau kapabilitas aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Program ini diarahkan pada peningkatan ketertiban penyusunan pelaporan keuangan dan hasil kerja.
5. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Program ini diarahkan untuk mencegah dan mengurangi munculnya kejadian konflik sosial yang berlatar belakang Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan, meningkatkan jumlah organisasi kemasyarakatan yang keberadaannya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan Negara, mencegah dan mengurangi munculnya kejadian perkelahian antar pelajar dan antar warga yang terjadi di Kota Semarang selama satu tahun.
6. Program Pendidikan Politik Masyarakat. Program ini diarahkan untuk meningkatkan angka indeks pengembangan demokrasi Pancasila dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu/ pemilukada.
7. Program Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Lingkungan. Program ini diarahkan pada peningkatan kemampuan analisa intelijen strategis terhadap potensi gangguan ipoleksosbudhankam (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan).
8. Program Pengendalian dan Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Program ini diarahkan untuk Peningkatan kesadaran ketentraman dan kenyamanan melalui pemberdayaan masyarakat.



9. Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah. Program ini diarahkan untuk Peningkatan masyarakat yang tertib dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan
10. Program Pengembangan Potensi dan Pemberdayaan SATLINMAS. Program ini diarahkan untuk Peningkatan kewaspadaan LINMAS terhadap gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui pembinaan dan peningkatan anggota LINMAS.
11. Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dan sarana prasarana serta sumber daya manusia Dinas Pemadam Kebakaran dan masyarakat)
12. Program Penanganan Bencana, Program ini diarahkan pada penanganan saat terjadi bencana. Program ini diarahkan untuk melatih berbagai elemen masyarakat dalam rangka kesiap-siagaan dalam penanganan bencana serta penyebarluasan informasi terkait bencana.
13. Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana, Program ini diarahkan pada pengurangan risiko bencana yang terintegrasi dalam setiap dimensi pembangunan.
14. Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Bencana Program ini diarahkan pada pemulihan paska terjadi bencana

B. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1. REALISASI KEUANGAN

Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2018 sebesar :

NO	OPD	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	17.740.704.000	17.243.686.551	97%
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	11.654.840.860	10.612.043.386	91%
3	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	15.431.282.250	14.342.719.954	93%
4	BPBD	8.093.467.000	7.763.561.468	96%
	JUMLAH	52.920.294.110	49.962.011.359	94%

Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat tahun 2018 sebagai berikut :



KODE REK.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PROSEN TASE (%)
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	17.740.704.000	17.243.686.551	97.2%
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,370,130,000	4,251,687,751	97,29%
002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	229,500,000	224,505,281	98,82%
008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	113,760,000	102,850,000	90,32%
010	Penyediaan alat tulis kantor	70,000,000	66,697,000	95,28%
011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	45,000,000	39,976,840	88,84%
012	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	15,000,000	13,261,500	88,41%
014	Penyediaan peralatan rumah tangga	15,000,000	14,845,000	98,97%
015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	16,200,000	16,200,000	100%
017	Penyediaan makanan dan minuman	44,375,000	40,062,500	90,28%
018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1,059,350,000	1,059,286,830	99,99%
028	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	1,476,600,000	1,476,600,000	100%
154	Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran	1,285,345,000	1,197,502,800	93,17%
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,821,439,000	2,643,320,590	93,69%
007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	48,200,000	47,310,000	98,15%
009	Pengadaan peralatan gedung kantor	477,927,200	476,527,200	99,71%
022	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	471,050,000	460,692,000	97,8%
024	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	1,612,271,100	1,479,178,865	91,75%
028	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	132,900,000	106,497,500	80,13%
029	Pemeliharaan rutin / berkala mebeluer	24,000,000	23,896,750	99,57%
096	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	35,680,700	30,808,275	86,34%
139	Pengelolaan website	19,410,000	18,410,000	94,85%
03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	157,000,000	156,385,000	99,61%
002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	157,000,000	156,385,000	99,61%
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	247,303,000	245,681,000	99,34%
004	Bimbingan teknis / pembinaan sumber daya manusia	247,303,000	245,681,000	99,34%
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	294,220,000	276,422,500	94%
005	Penunjang kinerja PA, Ppk, bendahara dan pembantu	249,470,000	249,470,000	100%
006	Penyusunan LKPJ skpd,	3,800,000	3,800,000	100%
010	Penyusunan LAKIP	3,800,000	3,800,000	100%
017	Penyusunan laporan Renja (rencana kerja)	3,800,000	3,800,000	100%
020	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun,	3,800,000	3,800,000	100%
022	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran,	800,000	630,000	78,75%
023	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	800,000	630,000	78,75%
034	Penyusunan RKA skpd dan DPA skpd	7,000,000	7,000,000	100%
18	Program Pengendalian dan Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5,377,208,000	5,255,269,300	98%
001	Pengawasan pelanggaran perda dan trantibum	98,800,000	84,845,800	91,43%
004	Peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap gangguan trantibmas	5,289,902,000	5,228,896,000	98,85%
005	Gelar pasukan ketentraman dan ketertiban umum	150,600,000	149,200,000	99,07%
009	Pengamanan dan pengendalian trantibum	60,040,000	59,426,880	98,98%



010	Pengamanan obyek vital dan kegiatan penting pemerintah	166,700,00	141,596,900	84,94%
19	Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	2,995,450,000	2,926,250,730	97,69%
001	Penertiban dan penindakan	2,213,598,000	2,177,674,910	98,38%
004	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah	158,060,000	156,744,300	99,17%
007	Penyelidikan, penyidikan, dan persidangan pelanggaran PERDA	332,762,000	313,132,600	94,1%
008	Pembinaan PPNS daerah	155,200,000	150,403,620	96,91%
009	Pengelolaan pengaduan dan gangguan ketentraman ketertiban masyarakat	79,580,000	78,618,700	98,79%
010	Peningkatan kewaspadaan dini	56,250,000	49,676,600	88,31%
20	Program Pengembangan Potensi dan Pemberdayaan Satlinmas	749,216,000	733,686,500	98%
011	Pengerahan dan peningkatan kewaspadaan linmas terhadap gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan	656,372,000	631,717,900	96,24%
012	Fasilitasi, Pembinaan dan peningkatan SDM linmas	332,762,000	332,112,000	99,8%
30	Program Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Lingkungan	126,936,000	119,636,000	94,25%
001	Data base dan aplikasi linmas	32,936,000	25,636,000	77,84%
002	Monitoring dan evaluasi administrasi system keamanan lingkungan	94,000,000	94,000,000	100%
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7.586.237.860	6.854.707.875	90.36
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.582.744.710	1.324.994.351	83.71
002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000	3.315.796	33.16
006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	10.856.000	10.075.625	92.81
010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	50.000.000	49.975.000	99.95
011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000	29.999.750	100
012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	2.189.000	43.78
014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000	3.000.000	100
015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	10.000.000	100
017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	28.600.000	28.381.500	99.24
018	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	489.984.710	405.203.680	82.70
028	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	836.450.000	676.405.000	80.87
154	Kegiatan Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	108.854.000	106.449.000	97.79
02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	297.674.321	292.799.140	98.36
024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	248.264.640	243.390.140	98.04
026	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	49.409.681	49.409.000	100
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	116.015.000	94.732.845	81.66
022	Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Aparatur	116.015.000	94.732.845	81.66
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	254.300.000	254.262.000	99.99
005	Kegiatan Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu	239.100.000	239.100.000	100
006	Kegiatan Penyusunan LKPJ SKPD	2.320.000	2.318.000	99.91
010	Kegiatan Penyusunan LAKIP	2.320.000	2.318.000	99.91



020	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2.320.000	2.318.000	99.91
022	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	1.800.000	1.786.000	99.22
023	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.800.000	1.786.000	99.22
028	Kegiatan Penyusunan Renja SKPD	2.320.000	2.318.000	99.91
032	Kegiatan Penyusunan RKA dan DPA Murni serta Perubahan	2.320.000	2.318.000	99.91
16	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1.576.203.072	1.515.396.266	96.14
027	Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	183.115.000	180.772.566	98.72
18	Kegiatan Pendayagunaan Potensi Ormas/LSM	239.190.000	232.928.000	97.38
020	Kegiatan Peningkatan Ketahanan Bangsa Bagi Masyarakat	309.322.036	296.772.500	95.94
025	Kegiatan Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal	126.470.000	122.970.000	97.23
047	Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Paguyuban PETAMAS	163.900.000	163.169.600	99.55
056	Kegiatan Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	41.984.000	39.392.000	93.83
058	Kegiatan Pengaturan, Pengawasan dan Pemberdayaan Organisasi Masyarakat	242.222.036	216.390.600	89.34
059	Kegiatan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara	270.000.000	263.001.000	97.41
21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	993.323.300	820.949.377	82.65
001	Kegiatan Pengelolaan Bantuan Parpol	95.650.000	79.051.240	82.65
002	Kegiatan Fasilitasi Peraturan Perundang-undangan Bagi Partai Politik	50.522.500	42.472.500	84.07
005	Kegiatan Pendidikan Politik Kewarganegaraan bagi Masyarakat, Aparatur Negara, Partai Politik dan Generasi Muda	413.882.000	405.888.900	98.07
009	Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Pengurus OSIS SLTA	324.360.000	217.339.900	67.01
011	Kegiatan Fasilitasi Pemilu/ Pemilukada	86.368.800	55.480.437	64.24
019	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Parpol/Ormas/LSM	22.540.000	20.716.400	91.91
020	Program Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Lingkungan	2.756.977.457	2.551.573.896	92.25
021	Kegiatan Peningkatan Pemantauan Situasi dan Kondisi Daerah terhadap Potensi Kerawanan Sosial Politik	102.240.350	100.945.719	98.73
022	Kegiatan Pemantapan Kewaspadaan Dini Masyarakat	29.850.000	26.353.000	88.28
023	Kegiatan Peningkatan Kewaspadaan Kegiatan Tempat Hiburan dan Keramaian Umum	19.975.000	14.876.000	74.47
4	Kegiatan Penguatan Pengamanan Masyarakat terhadap Kerawanan Sosial	2.168.490.071	1.967.657.148	90.74
5	Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Komunitas Intelejen Daerah	345.422.036	341.742.029	98.93
6	Kegiatan Pengawasan terhadap Kepatuhan Norma dan Aturan bagi WNA dan Ormas Asing	100.000.000	100.000.000	100
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN			
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.080.844.300	1.916.938.967	92.12
002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	343.800.000	288,646,194	83.96
008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	63.918.000	63,917,752	100
009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	63.883.000	23,680,000	37.07
010	Penyediaan alat tulis kantor	69.057.700	50,764,500	73.51
011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	57.740.800	39,982,800	69.25
015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000	380,500	12.68



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang
Akhir Tahun Anggaran 2018

017	Penyediaan makanan dan minuman	79.432.500	79,385,610	99.94
018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	617.427.000	597,386,479	96.75
154	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	36.611.300	29,325,000	80.1
002	Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran	745.974.000	743,470,132	99.66
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.787.738.000	1.599.912.551	89.49
009	Pengadaan peralatan gedung kantor	58.107.000	47,852,400	82.35
022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	189.706.000	139,691,200	73.64
024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1.234.399.000	1,154,958,648	93.56
028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	132.896.000	106,686,783	80.28
029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer	17.700.000	16,200,000	91.53
052	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan perlengkapan PMK	154.930.000	134,523,520	86.83
03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	268.093.000	260.455.000	97.15
002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	268.093.000	260,455,000	97.15
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	278.211.000	259.167.500	93.16
005	Penunjang kinerja PA, PPK, bendahara dan pembantu	252.970.000	239,825,000	94.8
006	Penyusunan LKPJ SKPD	2.836.000	2,173,000	76.62
010	Penyusunan LAKIP	3.790.000	2,733,000	72.11
020	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3.750.000	2,603,000	69.41
022	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	2.740.000	2,008,000	73.28
023	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	2.800.000	1,790,000	63.93
027	Penyusunan rencana perubahan dan RDPPA	2.800.000	2,430,000	86.79
028	Penyusunan Renja SKPD	3.725.000	3,175,500	85.25
034	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	2.800.000	2,430,000	86.79
22	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	11.016.395.950	10.306.245.936	93.55
003	Koordinasi perijinan pemanfaatan gedung	390.992.200	387,610,131	99.14
005	Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	125.243.000	123,923,000	98.95
007	Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran	145.565.000	106,082,500	72.88
008	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	196.702.400	179,962,000	91.49
012	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	124.480.000	116,656,200	93.71
015	Lomba ketrampilan pemadaman kebakaran & penanggulangan bencana	13.016.750	12,446,750	95.62
016	Operasi pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	9.686.483.600	9,084,731,955	93.79
025	Pengembangan dan pemberdayaan satuan relawan kebakaran (Satlakar)	258.778.000	231,553,400	89.48
026	Gladi lapang menghadapi musim kemarau	66.685.000	56,781,000	85.15
027	Pendataan dan pelaporan kejadian kebakaran	8.450.000	6,499,000	76.91
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8.093.467.000	7.763.561.468	95,92
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.183.128.500	2.056.530.473	94,2
001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	100
002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	173.600.000	151.194.036	87,09
006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	22.000.000	16.449.325	74,77
008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	124.080.000	123.708.400	99.7
009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	76.970.000	73.566.000	95.58



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang
Akhir Tahun Anggaran 2018

010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	50.255.500	48.860.500	97,22
011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian	43.812.500	43.610.000	99,54
012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	6.142.000	5.934.500	96,62
014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	51.942.500	51.119.800	98,42
015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000	2.900.000	96,67
016	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	243.790.000	223.480.082	91,67
017	Penyediaan Makanan dan Minuman	54.312.000	47.500.000	87,46
018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	512.400.000	504.230.330	98,41
028	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	358.415.000	346.697.500	96,73
032	Penyediaan Jasa Pengamanan	130.170.000	129.300.000	99,33
145	Kegiatan Penyediaan Publikasi dan Dokumentasi	15.000.000	15.000.000	100
154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	314.239.000	269.980.000	85,92
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.607.747.800	1.591.058.731	98,96
005	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	755.395.000	753.995.000	99,81
010	Pengadaan Mebeluer	137.859.000	137.489.000	99,73
019	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	423.265.000	422.940.633	99,92
022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	47.870.000	45.995.100	96,08
024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	205.858.800	193.627.998	94,06
029	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer	5.900.000	5.850.000	99,15
139	Pengelolaan Web Site	31.600.000	31.161.000	98,61
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60.000.000	48.168.000	80,28
022	Pembinaan Sumber Daya Aparatur	60.000.000	48.168.000	80,28
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	211.960.000	208.160.000	98,21
005	Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara Dan Pembantu	162.360.000	158.560.000	97,66
006	Penyusunan LKPJ SKPD	8.650.000	8.650.000	100
010	Penyusunan LAKIP	8.650.000	8.650.000	100
020	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	4.380.000	4.380.000	100
022	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	2.770.000	2.770.000	100
023	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	4.860.000	4.860.000	100
028	Penyusunan RENJA SKPD	8.770.000	8.770.000	100
031	Penyusunan RKA dan DPA Murni	6.580.000	6.580.000	100
033	Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan	4.940.000	4.940.000	100
23	Program Penanganan Bencana	1.182.539.000	1.166.505.980	98,64
1	Penanggulangan dan Evakuasi Korban Bencana	20.000.000	15.520.000	77,6
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanganan Bencana	365.710.000	364.752.000	99,74
3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Bidang Kebencanaan	50.000.000	50.000.000	100
4	Penyediaan Logistik, Obat-obatan dan Bantuan Korban Bencana	681.829.000	679.028.980	99,59
5	Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Tanggap Darurat	65.000.000	57.205.000	88,01
	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1.984.343.500	1.870.704.584	94,27
1	Gladi Lapang Penanganan Bencana	67.420.000	61.414.000	91,09
2	Operasional Posko dan Penanggulangan Bencana Kota Semarang	903.864.000	890.493.000	98,52
4	Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas (PRB BK)	230.375.000	169.150.000	73,42



5	Forum PRB	92.500.000	89.535.000	96.79
6	Kelurahan Siaga Bencana	87.293.000	85.167.600	97.57
7	Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana	209.261.500	200.573.000	95.85
8	Peningkatan Sumberdaya Manusia KSB	65.380.000	65.197.500	99.72
9	Peringatan Dini Bencana / EWS	328.250.000	309.174.484	94.19
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana	863.748.200	822.433.700	95.22
1	Pemulihan Kondisi Psikologis Akibat Bencana	60.600.000	59.535.000	98.24
2	Rekonsiliasi Dan Resolusi Konflik	68.200.000	67.135.000	98.44
3	Fasilitasi Pemberdayaan Kehidupan Sosial Ekonomi Dampak Bencana	43.042.500	40.680.000	94.51
4	Pelatihan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana	59.232.500	57.395.000	96.9
5	Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Bencana	59.232.500	56.847.000	95.97
6	Inventarisasi Dan Identifikasi Kerusakan Infrastruktur Dampak Bencana	52.382.500	49.259.500	94.04
7	Pemulihan Kembali Prasarana Dan Sarana Infrastruktur Akibat Bencana	262.913.200	254.323.200	96.73
8	Penanganan Pengungsi	59.582.500	58.582.500	98.32
9	Pemberdayaan Masyarakat Penanganan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi	133.582.500	130.542.500	97.72
10	Pengelolaan Bantuan Korban Bencana	64.980.000	48.134.000	74.08

2. HASIL YANG DICAPAI

Selama tahun 2018, pelaksanaan Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat menghasilkan kinerja sebagai berikut :

	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			REALISASI TAHUN 2017
		TARGET	REALISASI	%	
1	Angka kriminalitas	1.997	1.443	128	1.628
2	Angka kejadian konflik sosial yang berlatar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan	1 kejadian	0 kejadian	200	0 kejadian
3	Tingkat kondusivitas wilayah Kota Semarang terhadap gangguan trantibmas, potensi kerawanan sosial yang bermuatan SARA dan konflik politik	2	3	150	3
4	Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban	43 %	47,24 %	109	100%
5	Rasio Siskamling per jumlah Kelurahan	31,82	31,81	99	100%
6	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota	100	100	100	100%
7	Rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kota	0,89	0,83	93	96%
8	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	22,31	30	%	35
9	Tingkat Waktu Tanggap (<i>response time rate</i>) jumlah ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran	87	98.78	%	91.86
10	Persentase fasilitasi kelompok jejaring kebencanaan	53,03%	64,73%	122,06%	41,67%
11	Persentase kawasan rawan bencana yang didukung oleh EWS	40%	40%	100%	0%
12	Persentase cakupan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana	78,02%	85%	108,95%	70,68%
13	Persentase pemenuhan bagi korban bencana	93,57%	100%	106,87%	85,71%
14	Persentase cakupan pemulihan pasca bencana	88,75%	90%	101,41%	86,75%



Tindakan kejahatan kriminalitas, unjuk rasa, dan mogok kerja merupakan tindakan yang merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, kemampuan menurunkan angka kriminalitas dan konflik sosial yang berlatar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan memiliki peran penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat karena mampu mendukung iklim berinvestasi di Kota Semarang. Upaya meredam konflik sosial dari yang ditargetkan 1 (satu) kejadian hingga mampu menggapai capaian 200%, yaitu 0 (nol) kejadian. Capaian ini tidak lepas dari koordinasi dan komunikasi dengan semua *stakeholder* terkait yang tergabung dalam Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Semarang.

Untuk capaian indikator kinerja daerah yang dilaksanakan yaitu rasio siskamling pada tahun 2018 mencapai 31,81 % yaitu sejumlah 5.630 siskamling dibagi 177 kelurahan yang ada di Kota Semarang. Untuk cakupan penegakan perda mencapai 100 % yang dihitung dari jumlah penanganan dibandingkan jumlah pelanggaran dan temuan yang dilaporkan yaitu sejumlah 798 pelanggaran. Dan untuk rasio petugas Linmas mencapai 7.948 orang atau 83% dari jumlah yang diharapkan.

Semua indikator untuk mencapai tujuan terwujudnya kondusivitas wilayah dengan indikator persentase penurunan jumlah gangguan keamanan dan ketertiban sebesar 41,40 % dimana pada tahun 2018 telah tercapai yaitu sebanyak 47,24% dari angka 2.803 kejadian yang meliputi angka kriminalitas, tindak pidana ringan dan gangguan ketentraman ketertiban. Jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun 2017 yaitu 3.112 kejadian atau menurun 9,92 % dari tahun sebelumnya.

Pada Tahun 2018 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Tingkat Waktu Tanggap (*response time rate*) jumlah ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran dari yang ditargetkan 87% menjadi 98.78%. Pada tahun 2018 kinerja yang dicapai BPBD Kota Semarang adalah berhasil melaksanakan :

1. a. Persentase fasilitasi kelompok jejaring kebencanaan dari target 53,03% tercapai 64.73% dengan capaian 122,06%,
b. Persentase kawasan rawan bencana yang didukung oleh EWS dari target 40% tercapai 40% dengan capaian 100%, terpasangnya EWS pada Kelurahan Meteseh dan Kelurahan Mangkang.
c. Persentase cakupan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana dari target 78,02% tercapai 85% dengan capaian 108,95%,
2. Persentase pemenuhan bagi korban bencana dari target 93,57% tercapai 100% atau capaian 106,87%,
3. Persentase cakupan pemulihan pasca bencana dari target 88,75% tercapai 90% dengan capaian 101,41%



1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			REALISASI TAHUN 2017
	TARGET	REALISASI	%	
1 Jumlah kejadian konflik sosial yang belatar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan	1 Kejadian	0 kejadian	200	0 kejadian
2 Jumlah ormas yang keberadaannya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara	60 Organisasi	74 Organisasi	123	52 organisasi
3 Jumlah kejadian perkelahian antar pelajar dan antar warga yang terjadi di Kota Semarang selama satu tahun	10 Kejadian	5 Kejadian	150	5 kejadian

Pada tahun 2018 kinerja yang dicapai adalah “Jumlah kejadian konflik sosial yang belatar belakang suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)” dari yang ditargetkan 1 kejadian namun di Kota Semarang tidak terjadi konflik SARA yang meluas (0 kejadian) sehingga dinilai berhasil meminimalisir terjadinya konflik sosial. Capaian ini sama dengan capaian pada tahun 2017 lalu, yaitu sebesar 0 kejadian konflik sosial. Penguatan wasasan kebangsaan yang diartikan sebagai cara pandang Bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan ipoleksosbudhankam (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan) mutlak dibutuhkan untuk memelihara kondusivitas wilayah dan menjaga keutuhan NKRI dari segala potensi konflik sosial yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Jumlah ormas dan lembaga nirlaba yang berada bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara - yaitu ormas dan lembaga nirlaba yang apabila menarik keberadaan, peran maupun fungsinya maka akan menimbulkan goncangan pelayanan publik dari yang ditargetkan 60 organisasi menjadi 74 organisasi, atau tercapai 123%. Hal ini meningkat dibandingkan tahun 2017 sebanyak 52 organisasi.

Jumlah kejadian perkelahian antar pelajar dan antar warga yang terjadi di Kota Semarang selama satu tahun dari yang ditargetkan 10 kejadian menjadi 5 kejadian, atau tercapai 150% . Hal ini masih sama dengan jumlah kejadian sepanjang tahun 2017 sebesar 5 kejadian.

Penguatan wasasan kebangsaan yang diartikan sebagai cara pandang Bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan ipoleksosbudhankam (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan) mutlak dibutuhkan untuk memelihara kondusivitas wilayah dan menjaga keutuhan NKRI.

NKRI memiliki bentuk negara demokrasi dimana pemerintahan dibentuk dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem negara demokrasi juga menjamin hak-hak warga negaranya untuk mengeluarkan pendapat. Secara lebih khusus, hal itu diatur dalam pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.



Sebagai wujud pengaplikasian pasal tersebut adalah diterbitkannya UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Organisasi Kemasyarakatan, yang selanjutnya disebut ormas, adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. “Partisipasi dalam pembangunan” itulah yang ditekankan dalam memfasilitasi kegiatan ormas, agar kegiatan ormas memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, fasilitasi Ormas yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang diarahkan untuk meningkatkan kemanfaatan ormas.

Jumlah ormas yang keberadaannya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara, yaitu organisasi kemasyarakatan yang menyediakan produk-produk pelayanan publik, memang jumlahnya kian meningkat namun hal itu tetap harus ditingkatkan lagi mengingat kebebasan berdemokrasi juga berpotensi memunculkan ormas yang meresahkan masyarakat maupun ormas-ormas radikal.

Penguatan wawasan kebangsaan juga diperlukan untuk mengantisipasi munculnya masalah tawuran antar pelajar yang masih kerap terjadi di tahun 2018 ini. Namun, menanamkan nilai-nilai kebangsaan bukan satu-satunya cara untuk mengeliminir tindak tawuran yang dilakukan para pelajar. Hal ini mengingat banyak faktor yang mendorong para pelajar untuk terlibat dalam tindak tawuran, antara lain:

a. faktor internal :

- kondisi emosi remaja yang cenderung labil sehingga mudah terpicu oleh hal-hal kecil sekalipun;
- masa remaja merupakan masa pencarian jati diri sehingga remaja mudah terpengaruh pada hal-hal di luar dirinya, terutama pengaruh *peer group* (kelompok bermain).

b. faktor eksternal :

- faktor keluarga : keluarga adalah tempat anak mendapatkan pendidikan pertama dan utama. Anak yang terbiasa melihat kekerasan di dalam keluarganya maka ia terbiasa pula dengan tindak kekerasan di luar lingkungan keluarga, termasuk di sekolah. Selain itu, ketidakharmonisan keluarga juga bisa menjadi penyebab kekerasan yang dilakukan pelajar. Dalam keluarga yang tidak harmonis, anak cenderung kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya, akibatnya orang tua tidak mengetahui perkembangan anaknya, lingkungan tempat anak bergaul, serta teman-teman akrab anaknya. Padahal remaja cenderung mengikuti kehendak *peer group* (kelompok bermain) nya. Jika bergaul dengan anak-anak yang gemar



membuat kerusuhan maka bukannya tidak mungkin, anak juga akan mudah terlibat dalam tindak tawuran.

- faktor sekolah : di samping rumah, sekolah juga memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian seorang anak mengingat sebagian besar waktu anak dihabiskan di sekolah. Masih adanya tindak kekerasan dalam mendidik siswa di sekolah menyebabkan siswa akrab dengan tindak kekerasan. Hal ini menyebabkan siswa mudah terjerumus dalam tindak tawuran. Selain itu, guru memegang peranan yang tidak kalah penting. Fungsi guru sebagai pendidik perlu dikuatkan, bukan hanya guru sebagai pengajar.
- Untuk mengurangi tindak tawuran, bisa ditempuh melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan positif yang melibatkan berbagai sekolah. Dari kegiatan semacam itu, diharapkan muncul keakraban secara universal di kalangan pelajar. Hal inilah yang coba dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dengan menyelenggarakan Kemah Pembauran dan Pelatihan Bela Negara.
- faktor lingkungan : tawuran merupakan perilaku kelompok. Ada sejarah, tradisi, dan *stereotype* lama yang melekat pada satu sekolah yang kemudian ter-indoktrinasi dari pelajar senior kepada pelajar junior. Rantai inilah yang harus diputus. Media massa dan media televisi juga memiliki peran dalam memunculkan tindak tawuran sehingga harus informasi yang disampaikan melalui media massa juga harus di-filter. Media massa yang terus memaparkan kekerasan membuat anak akrab dengan kekerasan sehingga kekerasan bukan lagi hal yang tabu bagi mereka, termasuk tindak kekerasan dalam tawuran.

Tawuran tidak hanya terjadi antar pelajar di Kota Semarang namun juga antar warga di Kota Semarang, yaitu dua kejadian tawuran antar warga Bandarharjo dan warga kuningan. Penyelesaian kasus tawuran antar warga bukanlah hal yang sederhana mengingat banyak faktor yang menyebabkan tawuran antar warga. Secara internal, faktor yang menyebabkan tawuran antar warga adalah kompleks perbedaan pandangan, budaya, tingkat ekonomi, dan kebiasaan-kebiasan pada suatu lingkungan tertentu. Sedangkan secara eksternal, penyebab tawuran antar warga dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Faktor keluarga → pengaruh buruk keluarga, tingkah laku kriminal, dan tindakan asusila serta buruknya pola asuh dalam keluarga;
- b. Faktor lingkungan → adanya warga yang menjadi provokator dapat mempengaruhi warga lainnya untuk bertindak agresif terhadap warga lain. Perbedaan idealisme masing-masing kelompok masyarakat yang disertai



dengan intoleransi dapat memicu munculnya tawuran antar warga masyarakat.

Anak-anak dapat meniru perilaku agresif yang mereka tonton. Perilaku modeling ini menyebabkan munculnya kejadian tawuran antar anak-anak warga Kuningan dengan warga Bandarharjo yang menyebabkan delapan orang diamankan pada bulan Oktober 2018.

2. Program Pendidikan Politik Masyarakat

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			REALISASI TAHUN 2017	
	TARGET	REALISASI	%		
1	Indeks Pengembangan Demokrasi Pancasila	2.4	2.16	90	3.52
2	Prosentase partisipasi pemilih dalam pemilu/ pemilukada	66	72.80	110	N/A

Pada tahun 2018 kinerja yang dicapai adalah Indeks Pengembangan Demokrasi Pancasila dari yang ditargetkan 2.4 indeks tercapai 2.16, atau tercapai sekitar 910%. Partisipasi pemilih Kota Semarang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah pada Tahun 2018 mencapai angka 72.80% dari yang ditargetkan 66%, atau tercapai 110%. Kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilu. Peningkatan partisipasi pemilih ini tidak lepas dari upaya sosialisasi yang dilakukan kepada pengurus partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, penyandang disabilitas, pengurus organisasi wanita serta generasi muda (pelajar) Kota Semarang.

Tabel Penilaian Indeks Pengembangan Demokrasi Pancasila

Nilai Persepsi	Nilai Interval Skor IPDP	Nilai Interval Konversi IPDP	Skor Huruf	Kinerja IPDP
1	1.00 – 1.75	25.00 – 43.75	D	Sangat Tidak Baik
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	C	Tidak Baik
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	B	Baik
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	A	Sangat Baik

Sistem negara demokrasi yang dianut di negara ini memungkinkan setiap warga negara berperan aktif dalam menentukan arah dan tujuan bangsa ini. Peran serta aktif masyarakat bukan hanya dituntut saat pesta demokrasi tengah digelar namun diharapkan juga pada semua sendi kehidupan demokrasi. Upaya peningkatan peran serta tersebut tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu maupun pemilukada namun lebih kepada peningkatan kesadaran dan kesiapan masyarakat untuk mengembangkan demokrasi Pancasila. Dengan membudayakan demokrasi Pancasila, diharapkan perbedaan pendapat dan pandangan politik yang ada – yang merupakan konsekuensi lazim dari suatu sistem demokrasi – tidak hanya meningkatkan kematangan berdemokrasi masyarakat dengan tetap menjaga kondusivitas sosial dan politik di wilayah.



Partisipasi pemilih Kota Semarang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah pada Tahun 2018 mencapai angka 72.80% dari yang ditargetkan 66%. Peningkatan partisipasi pemilih merupakan wujud dari pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana diamanatkan pasal 434 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pemilihan umum, yaitu :

- a. Pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu;
- b. Pemantauan kelancaran penyelenggaraan Pemilu; dan
- c. Kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilu.

3. Program Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Lingkungan

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			REALISASI TAHUN 2017	
	TARGET	REALISASI	%		
1	Prosentase kemampuan analisa intelijen strategis terhadap potensi gangguan ipoleksosbudhankam	77 %	77%	100	76
2	Cakupan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	92 %	92 %	100	100
3	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (pada kelompok kecamatan) dan pelaksanaan patroli wisata	7200 kali	7200 kali	100	100 %
4	persentase gangguan ketertiban, kenyamanan dan bencana yang ditangani	100	100 %	100	100 %
5	Jumlah kegiatan seremonial dan perlombaan yang diikuti	5	5	100	100 %
6	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan trantibum	100	100 %	100	100 %
7	Persentase pengamanan objek vital dan kegiatan penting pemerintah	100	100 %	100	100 %
8	Persentase unjuk rasa yang diamankan	100 %	100 %	100	100 %

Pada tahun 2018 kinerja yang dicapai adalah “Prosentase kemampuan analisa intelijen strategis terhadap potensi gangguan ipoleksosbudhankam” dari yang ditargetkan 77% tercapai 77% sehingga mampu mencapai hasil yang telah ditargetkan. Capaian ini meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017 yang mencapai angka 76%. Mewujudkan kondusivitas wilayah tidak hanya membutuhkan upaya-upaya penegakan hukum. Namun demikian, tindakan pencegahan tidak kalah pentingnya. Dengan upaya-upaya preemtif dan preventif diharapkan potensi kerawanan sosial tidak berkembang menjadi kejadian aktual. Oleh karena itu, dibutuhkan kemampuan analisa intelijen strategis untuk memetakan potensi-potensi kerawanan sosial politik guna mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat. Kemampuan analisa intelijen strategis ini harus ditingkatkan mengingat potensi kerawanan sosial politik yang kian beragam seiring dengan berkembangnya era globalisasi yang membuat batasan wilayah dan fisik kian



nisbi. Kemampuan analisa yang tepat pada gilirannya akan mampu meredam kejadian konflik sosial yang terjadi secara komunal di wilayah Kota Semarang.

Mewujudkan kondusivitas wilayah tidak hanya membutuhkan upaya-upaya penegakan hukum. Namun demikian, tindakan pencegahan tidak kalah pentingnya. Dengan upaya-upaya preemtif dan preventif diharapkan potensi kerawanan sosial tidak berkembang menjadi kejadian aktual. Oleh karena itu, dibutuhkan kemampuan analisa intelijen strategis untuk memetakan potensi-potensi kerawanan sosial politik guna mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat. Kemampuan analisa intelijen strategis ini harus ditingkatkan mengingat potensi kerawanan sosial politik yang kian beragam seiring dengan berkembangnya era globalisasi yang membuat batasan wilayah dan fisik kian nisbi. Kemampuan analisa yang tepat pada gilirannya akan mampu meredam kejadian konflik sosial yang terjadi secara komunal di wilayah Kota Semarang.

4. Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2017			CAPAIAN TAHUN 2017
		TARGET	REALISASI	%	
1	Jumlah Peraturan Perundang-undangan Daerah yang ditegakkan	28 perda	28 perda	100	100
2	Cakupan penegakan pelanggaran peraturan daerah	100 %	100 %	100	100 %
3	Jumlah sosialisasi aturan perda	12 kali	12 kali	10	100 %
4	Jumlah penyelesaian pelanggaran perda	60 kasus	69 kasus	115	100 %
5	Jumlah sidang ditempat dan pengiriman sidang	9 kali	9 kali	100	100 %
6	Jumlah PPNS yang mengikuti pembinaan	90 orang	90 orang	100	100 %
7	Persentase pengaduan yang tertangani dan terselesaikan	100 %	100 %	100	100 %
8	Jumlah objek rawan gangguan trantibum dan pelanggaran perda yang teridentifikasi	28 objek	28 objek	100	100

Program penegakan Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah diarahkan untuk Peningkatan masyarakat yang tertib dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah sebanyak 28 jenis melalui deteksi dini, penanganan pengaduan dan reaksi cepat, sosialisasi, penertiban dan penindakan, penyidikan, serta pemberdayaan PPNS.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya indikator sebagaimana tersebut di atas antara lain sebagai berikut :

- Pada tahun 2018 telah dilaksanakan sejumlah 870 kegiatan penegakan Perda dari pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat dengan volume tertinggi pada pelanggaran PKL, PGOT dan Reklame yang berada di jalan protokol termasuk pula



penertiban alat peraga kampanye yang sudah mulai bermunculan dengan cara pemasangan yang menyalahi aturan.

- Untuk memberikan pemahaman mengenai peraturan daerah kepada masyarakat, maka dilaksanakan sosialisasi Perda pada objek rawan pelanggaran Perda sebanyak 60 kali dan juga sosialisasi khusus sebanyak 12 kali yang dilaksanakan di kecamatan-kecamatan.
- Sebagai tindaklanjut proses penegakan perda dengan penetapan sanksi administrasi/pidana melalui putusan pengadilan, selama tahun 2018 telah dilaksanakan sidang ditempat sebanyak 9 kali dengan fokus pelanggaran yaitu kebersihan, kependudukan, dan minuman keras.

5. Program Pengembangan Potensi dan Pemberdayaan Satlinmas

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			CAPAIAN TAHUN 2017
	TARGET	REALISASI	%	
1 Jumlah Linmas yang difasilitasi dan diberdayakan	3510 orang	3510 orang	100	100
2 Persentase kejadian bencana dan gangguan keamanan dan kenyamanan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100
3 Prosentase kegiatan profinsi / pusat yang diikuti	100	100	100	100
4 Persentase anggota Satlinmas yang diberi pendidikan dan pelatihan	100	100	100	100
5 Prosentase anggota Satlinmas yang diberi sarana pakaian	100	100	100	100

Program Pengembangan Potensi dan Pemberdayaan Satlinmas diarahkan untuk Peningkatan kewaspadaan LINMAS terhadap gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui kegiatan pengerahan dan peningkatan Kewaspadaan Linmas terhadap gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan dan Fasilitasi, pembinaan dan peningkatan SDM Satlinmas. Pada tahun 2018 terdapat sejumlah 7648 anggota Linmas di wilayah se-Kota Semarang yang bertugas menyelenggarakan kenyamanan dan ketentraman lingkungan. Dari jumlah tersebut telah terfasilitasi sebanyak 4221 orang baik itu pakaian maupun dalam bentuk peningkatan kualitas SDM.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya indikator sebagaimana tersebut di atas antara lain sebagai berikut :

- Pelaksanaan pengamanan langsung pada 3810 TPS dan juga pengamanan tak langsung pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.
- Posko PBA (Penanganan Bencana Alam) merupakan posko siaga yang dilaksanakan oleh petgas Satlinmas untuk menangani kejadian gangguan ketertiban lingkungan dan juga penanganan korban bencana yang dilaksanakan selama 24 jam. Selama tahun 2018 telah dilaksanakan sebanyak tindaklanjut laporan.



- Pelaksanaan patroli gabungan dilaksanakan bersama antara Satpol PP, Satlinmas dan TNI/POLRI pada tahun 2018 dilaksanakan sesuai target sebanyak 60 kali untuk mencegah dan mengantisipasi adanya potensi rawan yang menjadi ranah kewenangan masing-masing instansi.

6. Program Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Lingkungan

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2017			CAPAIAN TAHUN 2017
		TARGET	REALISASI	%	
1	Cakupan Perlindungan masyarakat	73 %	73 %	100	100
2	Persentase Rukun Tetangga yang memiliki petugas Linmas	89 %	89 %	100	100
3	Jumlah siskamling yang aktif dalam menjaga keamanan lingkungan	5623 siskamling	5623 siskamling	100	100
4	Monev siskamling	2 kegiatan	2 kegiatan	100	100
5	Jumlah Patroli Gabungan	60 kali	60 kali	100	100
6	Jumlah kegiatan yang melibatkan anggota Linmas	48 kegiatan	48 kegiatan	100	100

Kegiatan yang menjadi prioritas dalam urusan wajib Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilaksanakan dalam program pengendalian dan penanganan trantibum serta program penegakan peraturan perundang-undangan daerah berhasil dilaksanakan 100 %. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian indikator Cakupan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dan Jumlah Peraturan Perundang-undangan Daerah yang ditegakkan yang telah mencapai 100 %.

7. Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2018			REALISASI TAHUN 2017
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Persentase fasilitasi kelompok jejaring kebencanaan	53,03%	64,73%	122,06%	41,67%
2.	Persentase kawasan rawan bencana yang didukung oleh EWS	40%	40%	100%	0%
3.	Persentase cakupan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana	78,02%	85%	108,95%	70,68%

Pada tahun 2018 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan :

1. Persentase fasilitasi kelompok jejaring kebencanaan dari yang ditargetkan 53,03% menjadi 64,73%, atau berhasil mencapai target 122,06%. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2017 sebesar 42,67%.
2. Persentase kawasan rawan bencana yang didukung oleh EWS dari yang ditargetkan 40% menjadi 40%, atau berhasil mencapai target 100%. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2017 sebesar 0%.
3. Persentase cakupan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana dari yang ditargetkan 78,02% menjadi 85% atau berhasil mencapai target 100%. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2017 sebesar 108,95%.



Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

1. Gladi Lapang Penanganan Bencana
2. Operasional Posko Dan Penanggulangan Bencana Kota Semarang
3. Pemetaan Rawan Bencana
4. Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas (prb Bk)
5. Forum Prb
6. Kelurahan Siaga Bencana
7. Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana
8. Peningkatan Sumberdaya Manusia Ksb
9. Peringatan Dini Bencana / EWS

8. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2018			REALISASI TAHUN 2017
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Persentase pemenuhan bagi korban bencana	93,57%	100%	106,87%	85,71%

Pada tahun 2018 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Persentase pemenuhan bagi korban bencana dari yang ditargetkan 93,57% menjadi 100% atau berhasil mencapai target 106,87%. Hal ini meningkat/ dibandingkan capaian tahun 2017 sebesar 85,71%. Tersalurkannya bantuan kepada masyarakat terdampak saat terjadi bencana di Kota Semarang.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

1. Penanggulangan Dan Evakuasi Korban Bencana
 2. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Bencana
 3. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Bidang Kebencanaan
 4. Penyediaan Logistik, Obat-obatan Dan Bantuan Korban Bencana
 5. Peningkatan Kapasitas Sdm Dalam Tanggap Darurat
9. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2018			REALISASI TAHUN 2017
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Persentase cakupan pemulihan pasca bencana	88,75%	90%	101,41%	86,75%

Pada tahun 2018 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Persentase pemenuhan bagi korban bencana dari yang ditargetkan 88,75% menjadi 90% atau berhasil mencapai target 101,41%. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun



2017 sebesar 86,75%. Terlatihnya masyarakat tentang kajian kebutuhan pasca bencana, tersalurkannya bantuan sosial kepada masyarakat terdampak bencana di Kota Semarang .

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

1. Pemulihan Kondisi Psikologis Akibat Bencana
2. Rekonsiliasi Dan Resolusi Konflik
3. Fasilitasi Pemberdayaan Kehidupan Sosial Ekonomi Dampak Bencana
4. Pelatihan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana
5. Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Bencana
6. Inventarisasi Dan Identifikasi Kerusakan Infrastruktur Dampak Bencana
7. Pemulihan Kembali Prasarana Dan Sarana Infrastruktur Akibat Bencana
8. Penanganan Pengungsi
9. Pemberdayaan Masyarakat Penanganan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi
10. Pengelolaan Bantuan Korban Bencana

C. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2018, antara lain :

1. meskipun sampai dengan saat ini, di Kota Semarang belum pernah terjadi konflik sosial yang bersifat komunal namun bukan berarti potensi konflik sosial tidak ada. Potensi konflik sosial apabila tidak diantisipasi dengan baik dapat memunculkan konflik sosial yang bisa menimbulkan kerugian *materiil* maupun *immaterial*.
2. mengantisipasi kemunculan maupun penyebaran konflik sosial membutuhkan aksi yang cepat, tepat, dan tanggap dan hal ini tidak bisa dilakukan oleh satu atau dua organisasi perangkat daerah namun membutuhkan kerja sama dengan berbagai instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. pada awal kemunculan konflik sosial, harus diambil langkah-langkah pencegahan meluasnya konflik sosial melalui mediasi sebelum sampai pada tahapan negosiasi maupun litigasi sehingga dibutuhkan personil yang memiliki kemampuan awal mediator konflik.
4. Untuk mewujudkan kondisi tenteram dan tertib pada wilayah perkotaan yang semakin kompleks diperlukan kekuatan sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai, sedangkan untuk kualitas dan kuantitas SDM semakin lama semakin menurun seiring dengan tidak adanya penerimaan PNS.



5. Kurangnya sosialisasi sampai ke tingkat RT mengenai kondisi perlu adanya 1 orang Perlindungan Masyarakat (Linmas)/RT se-Kota Semarang, mengakibatkan kurangnya pemberdayaan Linmas dan juga kurang optimalnya penyelenggaraan sistem keamanan lingkungan pada lapisan tersebut.
6. Bahaya kebakaran selalu mengancam setiap saat di seluruh wilayah Kota Semarang.
7. Kompetensi dan profesionalisme SDM Dinas Pemadam Kebakaran masih perlu ditingkatkan lagi.
8. Infrastruktur daerah yang belum sepenuhnya mendukung peningkatan pelayanan penanggulangan kebakaran,
9. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
10. Koordinasi antar instansi terkait belum efektif.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dari permasalahan yang dihadapi, solusi yang diambil untuk penyelesaian masalah tersebut adalah :

1. dalam rangka mengantisipasi meluasnya potensi konflik sosial menjadi konflik sosial maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Semarang yang beranggotakan instansi terkait, baik instansi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang maupun instansi vertikal yang ada di Kota Semarang.
2. untuk mengantisipasi kemunculan maupun penyebaran konflik sosial, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang menyusun SOP (Standar Operasional Prosedur), baik SOP pencegahan konflik sosial, penanganan konflik sosial (baik konflik sosial dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan) serta penghentian konflik sosial.
3. memberikan pelatihan mediator konflik sosial kepada anggota Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Semarang pada bulan bulan November dan Desember 2018 .
4. Pengadaan kebutuhan personil petugas ketertiban baik itu dipenuhi melalui tenaga kontrak maupun seleksi petugas Satuan Perlindungan Masyarakat wilayah berdasarkan kajian kebutuhan personil secara komprehensif.
5. Penyelenggaraan sosialisasi sampai lapisan RT mengenai kondisi perlu adanya 1 orang Perlindungan Masyarakat (Linmas)/RT serta keaktifan sistem keamanan lingkungan sebagai upaya penyelenggaraan keamanan dan antisipasi pencegahan tidak kriminal.



6. Memperpendek area jangkauan pos pemadam kebakaran yang didukung personil, mobil pemadam sarana dan prasarana.
7. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM Dinas Pemadam Kebakaran secara rutin.
8. Meningkatkan pengawasan terhadap Sistem Proteksi Kebakaran pada bangunan/gedung untuk mendukung peningkatan pelayanan penanggulangan kebakaran,
9. Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
10. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait peningkatan pelayanan penanggulangan kebakaran

E. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

1. Pada tahun 2018, Pemerintah Kota Semarang, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, menerima penghargaan sebagai **Pemerintah Daerah Pembina Ormas Terbaik Tahun 2018**. Penghargaan dimaksud diterimakan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri pada tanggal 6 November 2018.
2. Juara I Lomba Parade dan Defile Dalam Rangka HUT Satpol PP Tingkat Provinsi Jawa Tengah.
3. Juara I Lomba Parade dan Defile Dalam Rangka HUT Linmas Tingkat Provinsi Jawa Tengah
4. Juara III Lomba Media Sosial Satpol PP Tingkat Provinsi Jawa Tengah.
5. Juara I Lomba Tenda pada Jambore Satpol PP Tingkat Provinsi Jawa Tengah.
6. Juara II Lomba TAGANA pada Jambore Satpol PP Tingkat Provinsi Jawa Tengah